



AGENDA 1 : Perkembangan Pelaksanaan Roadmap Pengarusutamaan EITI

EITI Indonesia

Rapat Forum Multi Stakeholder (MSG)

Yogyakarta, 18 Mei 2022

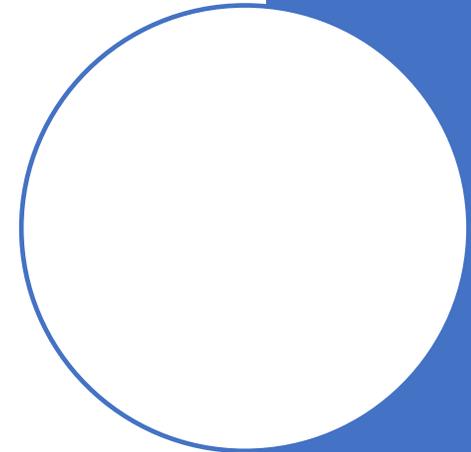
Topik Pembahasan Agenda 1

-
1. Dukungan Pengembangan Portal Data Ekstraktif

 2. Penyampaian Implementasi Pengarusutamaan EITI (*Partial Disclosures*) kepada Dewan EITI Internasional

 3. Perkembangan Integrasi Data untuk *Systematic Disclosures : progress* dan kendala yang perlu diselesaikan

 4. Diskusi dan Tindak Lanjut



1. Dukungan Pengembangan Portal Data Ekstraktif

- Dengan dukungan Bank Dunia, Sekretariat EITI Indonesia sedang mempersiapkan pengadaan *Consulting Services for Technical Assistance for Extractives Data Integration and Extractives Transparency Portal Development* atau “IT Firm”
- Tujuan utama dari penugasan ini adalah
 - membantu Forum MSG EITI Indonesia melalui KESDM dalam mengimplementasikan Roadmap Pengarusutamaan Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) yang telah disepakati
 - mengembangkan Portal Data Transparansi Ekstraktif yang terintegrasi “Satu Data” pada ESDM Data Enterprise (EDE).
- Pengadaan IT Firm semula dijadwalkan pada awal tahun 2022, lalu mengalami penjadwalan ulang pengadaan akan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2022.
- Rencana pekerjaan tahap pertama (tahun 2022) selama 12 bulan.
- Informasi pengadaan dibuka pada publik melalui situs : eiti.esdm.go.id

2. Penyampaian Implementasi Pengarusutamaan EITI kepada Dewan EITI Internasional

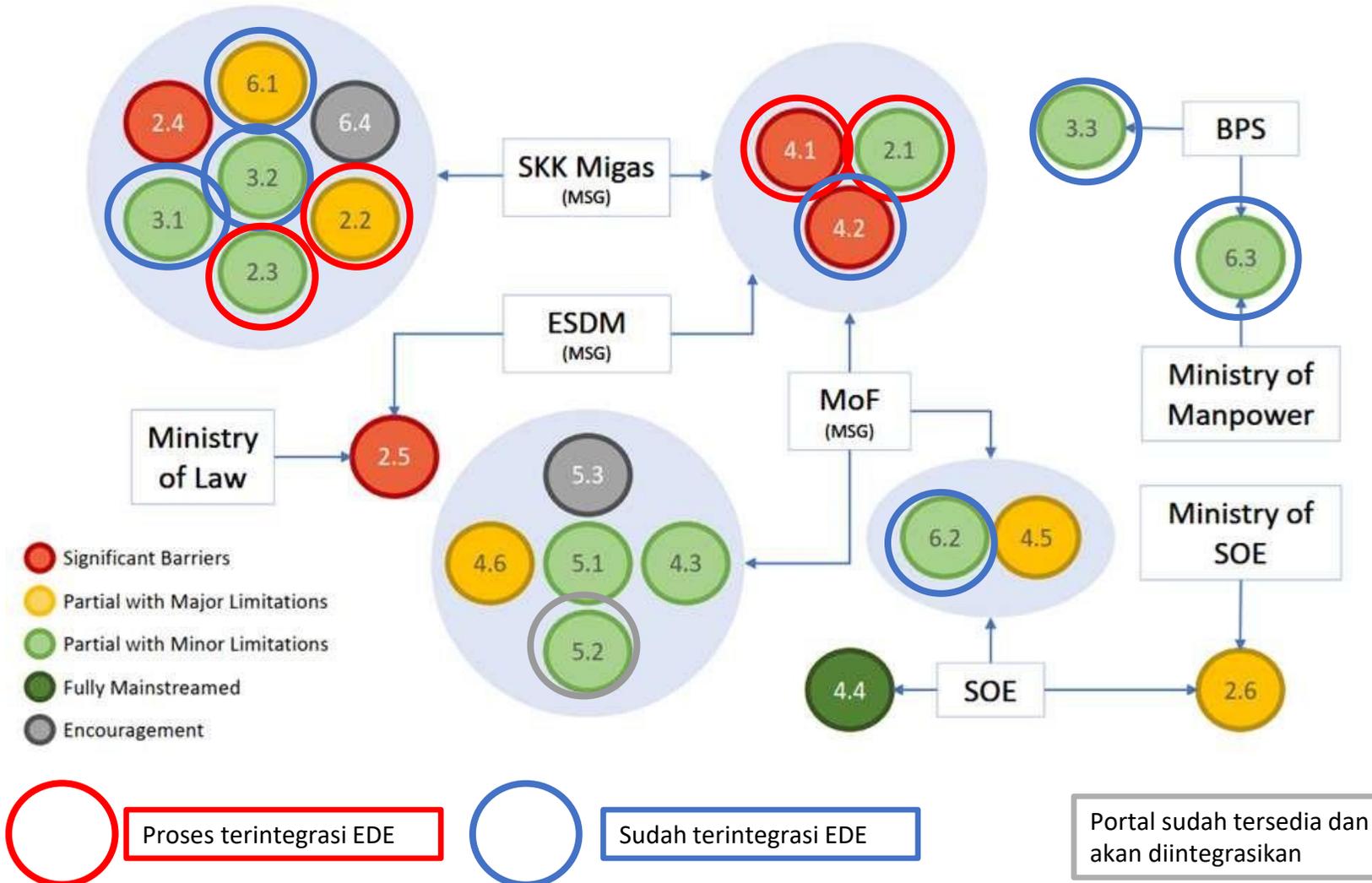
- Forum MSG EITI Indonesia mendukung pengembangan Portal Data Ekstraktif. Portal Data Ekstraktif adalah bentuk systematic disclosures, untuk :
 - mempublikasikan ulang data laporan EITI ke dalam platform data terbuka lintas pemerintah,
 - mengintegrasikan pengungkapan data yang telah menjadi mekanisme kerja Pemerintah.
- Data pajak, BO, dan kontrak pembukaannya belum dapat diintegrasikan secara langsung dalam Portal, maka sifatnya adalah partial disclosure
- Upaya MSG EITI Indonesia telah disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada Dewan EITI Internasional, dengan melampirkan bukti bahwa Pemerintah Indonesia dan Forum MSG EITI Indonesia :
 - Telah berkomitmen untuk menerapkannya, sebagaimana tertuang dalam pertemuan Forum MSG EITI Indonesia pada November 2021.
 - Telah melakukan Studi Kelayakan yang komprehensif, MSG, dengan dukungan dari Bank Dunia dan Sekretariat EITI International
 - Telah Menyusun Roadmap / Rencana kerja, termasuk untuk mengatasi kendala kapasitas dan kendala teknis.

3. Perkembangan Integrasi Data

Pemetaan Data Ekstraktif yang Sudah Terintegrasi dan yang Dalam Proses Integrasi per Requirement EITI



EITI Extractive Industry Transparency Initiative
Indonesia



Data Disclosure in EITI 2019 Standard

- 2.1 Legal Framework & Fiscal Regime
- 2.2 License Allocation
- 2.3 License Register
- 2.4 Contract
- 2.5 BO
- 2.6 State Participation
- 3.1 Exploration
- 3.2 Production
- 3.3 Export
- 4.1 Tax & Revenues
- 4.2 Sales of State's Share
- 4.3 Infrastructure Provision
- 4.4 Transportation Revenues
- 4.5 Transaction Related to SOEs
- 4.6 Subnational Payment
- 5.1 Distribution of Revenue
- 5.2 Subnational Transfer
- 5.3 Revenue Management
- 6.1 Social & Env. Expenditure
- 6.2 Quasi-Fiscal Expenditure
- 6.3 Economic Contribution
- 6.4 Environmental Impact

Perkembangan Integrasi Data

Status, Permasalahan, dan Tindak Lanjut Penyelesaian – Requirement 2



EITI Extractive
Industry
Transparency
Indonesia Initiative

Requirement EITI 2019	Status	Permasalahan / Isu untuk Diselesaikan	Tindak Lanjut
2.1 Legal Framework & Fiscal Regime	Sudah berkoordinasi dengan Setjen KESDM untuk penambahan deskripsi pada kata kunci pada situs jdih	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kemenkeu tentang penambahan deskripsi pada jdih Kemenkeu • Masih menunggu IT Firm untuk bantuan teknis penambahan deskripsi pada situs jdih 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu berkoordinasi dengan Biro Hukum Kemenkeu • Mempercepat pengadaan dukungan teknis IT (IT Firm)
2.2 Licence Allocation	Data alokasi izin dan lelang sektor migas sedang dalam proses integrasi dengan ESDM Data Enterprise (EDE)	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini data daftar peserta lelang migas belum dapat dilihat oleh publik, namun kedepannya akan dipublikasikan sesuai Permen ESDM no 35/2021 • Data transfer izin sector migas tidak tersedia • Akses ke aplikasi lelang sektor minerba belum tersedia, karena aplikasi belum di <i>Launching</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pembahasan tentang data peserta lelang untuk dibuka pada publik dan data transfer izin sector migas dan minerba • Melanjutkan pembahasan akses data pada aplikasi lelang sektor minerba
2.3 Licence Register	<i>Date of submission</i> terkait izin sektor migas sudah terintegrasi dengan EDE	Akses ke aplikasi lelang sektor minerba belum tersedia , karena aplikasi belum di launching, sehingga terkait <i>Date of submission perizinan belum dapat dimunculkan</i> , namun data terkait periode perizinan minerba tersedia di MOMI/geoportal.esdm.go.id	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pembahasan akses data pada aplikasi lelang sektor minerba
2.4 Contract	Belum Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian regulasi dan mitigasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi mitigasi risiko dan uji konsekuensi
2.5 Beneficial Ownership	Belum Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian regulasi dan mitigasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi internal KESDM
2.6 State Participation	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahun BUMN telah tersedia secara publik • Telah dilakukan komunikasi awal tentang kemungkinan integrasi data BUMN migas dan minerba 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi (dashboard) BUMN migas dan minerba pada Kemen BUMN hanya untuk penggunaan internal dan tidak bersifat publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pembahasan dengan Kemen BUMN

Perkembangan Integrasi Data

Status, Permasalahan, dan Tindak Lanjut Penyelesaian – Requirement 3



EITI *Extractive
Industry
Transparency
Initiative*
Indonesia

Requirement EITI 2019	Status	Kendala	Tindak Lanjut
3.1 Exploration	Telah diintegrasikan pada EDE	Memerlukan kelengkapan WK ID untuk proses integrasi antara tabel	Menunggu IT Firm untuk Portal Ekstraktif
3.2 Production	Telah diintegrasikan pada EDE		Menunggu IT Firm untuk Portal Ekstraktif
3.3 Export	Telah diintegrasikan pada EDE (mencakup HS Code untuk komoditas sektor migas dan minerba)		Menunggu IT Firm untuk Portal Ekstraktif

Perkembangan Integrasi Data



Status, Permasalahan, dan Tindak Lanjut Penyelesaian – Requirement 4

Requirement EITI 2019	Status	Kendala	Tindak Lanjut
4.1 Tax	<ul style="list-style-type: none"> Belum dapat diintegrasikan antar Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi data memerlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Memerlukan Lembar Otorisasi untuk membuka data per perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi lebih lanjut untuk PKS Pengumpulan lembar otorisasi
4.1 Revenues	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses integrasi sektor Minerba 	<ul style="list-style-type: none"> Belum dapat mengintegrasikan data PNBP Minerba (data final //audited hingga Badan Usaha) terdapat di SIMPONI dan E-PNBP karena ada perbedaan metode perhitungan serta masih ada perbedaan dengan data pada LKPP PNBP Migas terdapat di SIMPONI dengan level Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan lebih lanjut juga terkait PNBP Migas hingga level Badan Usaha)
4.2 Sales States of Share	Data sudah diintegrasikan dari SKK Migas ke EDE	Masih perlu koordinasi lanjutan untuk kebutuhan data yang diinginkan	Akan melakukan koordinasi kepada SKK Migas dan Ditjen migas terkait data yang dibutuhkan
4.3 Infrastruktur Provision & Barter Arrangement	Data bersumber LKPP (sektor Migas)		Perlu didiskusikan lebih lanjut
4.4 Transportation Revenue	Secara sistem belum diintegrasikan, namun data tersedia pada Laporan tahunan PT. Pertamina dan PT. KAI sudah dipublish secara reguler		Menunggu IT Firm terkait integrasi
4.5 Transactions Related to State-Owned Enterprises	Menggunakan data Annual Report dari perusahaan BUMN.	Aplikasi (dashboard) BUMN migas dan minerba pada Kemen BUMN hanya untuk penggunaan internal dan tidak bersifat publik	Perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Kemen BUMN terkait aplikasi yang dapat diintegrasikan
4.6 Subnational Payment	Saat ini dapat menyajikan Data APBD per kabupaten/kota		Menunggu IT Firm terkait integrasi

Perkembangan Integrasi Data

Status, Permasalahan, dan Tindak Lanjut Penyelesaian – *Requirement 5*



EITI Extractive
Industry
Transparency
Indonesia Initiative

Requirement EITI 2019	Status	Kendala	Tindak Lanjut
5.1 Distribution of Revenue	Menggunakan pendekatan Dana Bagi Hasil	Belum tersedianya <i>tracing</i> alokasi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif secara khusus untuk sektor tertentu (ear-marking)	Data alokasi Dana Bagi Hasil (Migas dan Minerba) dengan level Kabupaten/Kota ke daerah menjadi <i>proxy</i> pendekatan yang paling memungkinkan untuk menggambarkan distribusi penerimaan negara
5.2 Sub-national Transfer	Data DBH menggunakan aplikasi SIMTRADA (namun belum diintegrasikan)	<ul style="list-style-type: none">- PDRD Migas tidak tersedia- Pendapatan Asli Daerah (retribusi daerah dan pajak daerah) masih	Perlu koordinasi lebih lanjut ke DJPK terkait data DBH untuk proses integrasi dan publikasi variable yang digunakan dalam menghitung formula Perlju koordinasi lebih lanjut terkait SIKD
5.3 Revenue Management and Expenditures	Data APBN Kita dapat diakses publik dan diupdate secara reguler		Menunggu IT Firm terkait integrasi

Perkembangan Integrasi Data

Status, Permasalahan, dan Tindak Lanjut Penyelesaian – Requirement 6



EITI Extractive
Industry
Transparency
Indonesia Initiative

Requirement EITI 2019	Status	Kendala	Tindak Lanjut
6.1 Social and Environment Expenditure	<ul style="list-style-type: none"> • Data PPM sektor migas hulu tersedia total pada buku saku KESDM • Data PPM Minerba tersedia per aspek pada buku saku KESDM 9 (penerima manfaat PPM per ring I -II (radius terdekat dari kegiatan pertambangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini belum ada aplikasi yang tersedia yang menyediakan data PPM hingga penerima manfaat untuk diintegrasikan namun dapat diinput secara periodik by excel untuk data total/per aspek • Penerima manfaat PPM per ring I -II (radius terdekat dari kegiatan pertambangan saat ini dalam bentuk publikasi, perlu dipastikan keberlanjutannya informasi tersebut) 	IT firm untuk dapat membantu memasukan data PPM sesuai dengan kebutuhan data EITI
6.2 Quasi-Fiscal Expenditure	Data pengeluaran industry ekstraktif sudah ada di Ditjen Minerba namun belum dapat dipergunakan	Data DMO masih transaksional sedangkan di butuhkan adalah data Rekon	Pembahasan lanjutan dengan Ditjen Minerba
6.3 Economic Contribution	Data PDB / /PDRB dan Ekpor Impor sudah dapat ditarik dan di integrasikan melalui WEB API BPS	Perlu koordinasi lanuutan terkait data pertambangan rakyat dan Data tenaga kerja	Pembahasan lanjutan tentang data tenaga kerja dan pertambangan rakyat
6.4 Environmental Impact	Terkait data AMDAL Minerba terdapat KLHK Terkait data AMDAL Migas terdapat KLHK	Masih belum melakukan koordinasi dengan KLHK	Perlu koordinasi lebih lanjut

Diskusi dan Tindak Lanjut



eiti.esdm.go.id

Twitter : @EITI_ID



TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**